

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut merupakan sebuah upaya untuk mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang sangat penting secara konstitusional untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagai representasi lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten memiliki tugas dan fungsi yang secara substansi sama dengan Komisi Pemilihan Umum RI yang dilaksanakan sesuai porsi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

A. Kedudukan dan Tugas

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo mempunyai kedudukan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di daerah dan dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada KPU.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari:

- a. Sekretaris, mempunyai tugas membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu, memberikan dukungan teknis administratif, membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu, membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu, membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten, memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu, membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten.



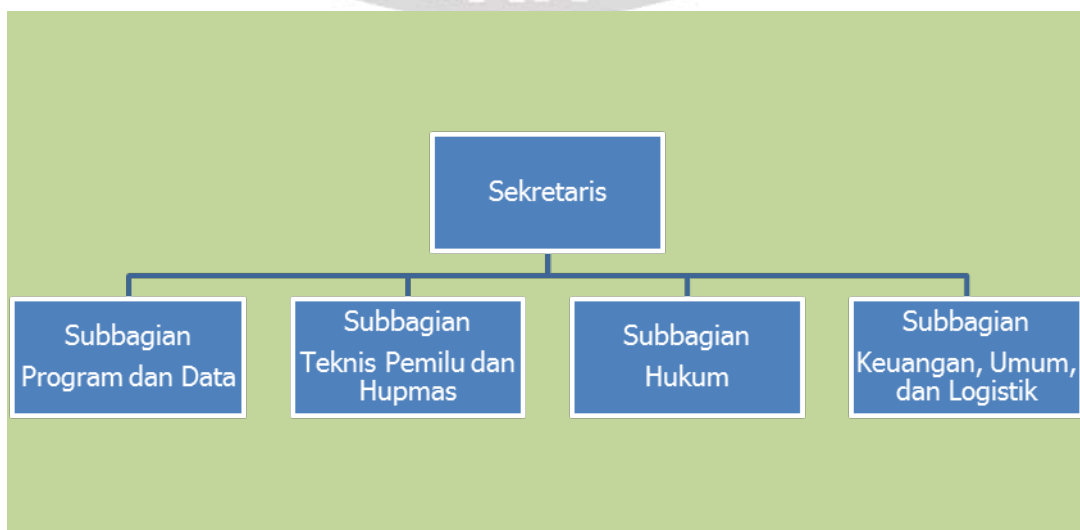
- b. Subbagian Program dan Data, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program, anggaran bersama dengan Subbagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pemilihan umum.
- c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu.
- d. Subbagian Hukum, mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga dan penyelesaian sengketa hukum, pengawasan pelaksanaan rencana dan program serta melaksanakan pelayanan informasi, sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- e. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik, mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran bersama dengan Subbagian Program, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan dan distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO



1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kinerja suatu organisasi dapat diukur dari keberhasilannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai sebuah lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal diantaranya Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta komitmen yang dibangun. Sedangkan dari aspek eksternal dipengaruhi oleh keberadaan stake holder bidang politik, kondisi masyarakat umum maupun regulasi yang terkait. Dalam rangka menganalisa keberadaan lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi. Berikut merupakan beberapa aspek yang memiliki kontribusi signifikan terhadap performa KPU Kabupaten Sidoarjo sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten.

A. Aspek Kelembagaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU Kabupaten merupakan satuan kerja KPU RI yang kelembagaannya bersifat mandiri dan bebas dari intervensi manapun. KPU Kabupaten juga berkomitmen dengan program KPU RI untuk melaksanakan reformasi birokrasi menuju organisasi pemilu yang professional dan independen.

B. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang menjadi personil di KPU Kabupaten Sidoarjo terdiri dari PNS organik dan PNS Daerah yang diperbantukan. Gabungan antara PNS DPK dengan PNS organik menjadi potensi yang mendukung keberadaan KPU Kabupaten Sidoarjo.

C. Aspek Kepemimpinan

Kepemimpinan KPU Kabupaten Sidoarjo bersifat terbuka dengan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan untuk membangun sebuah komitmen bersama. Setiap individu diberikan ruang dan kesempatan untuk berinovasi, mengemukakan ide/usul, dan mengkritisi. Hal ini dimaksudkan agar setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan merupakan keputusan yang aspiratif, dipahami dan didukung oleh setiap personil sehingga menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan.

D. Aspek Perencanaan dan Anggaran

KPU Kabupaten Sidoarjo melalui masing-masing sub bagian yang ada, telah melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran setiap tahun. Penyusunan perencanaan dimaksud dilaksanakan melalui penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran dan Biaya untuk masing-masing output kegiatan. Mekanisme yang sudah dilaksanakan merupakan bahan bagi KPU RI untuk merumuskan kebutuhan masing-masing KPU Kabupaten Kota.

E. Aspek Business Process dan Kebijakan

Dari aspek business process dan kebijakan KPU Kabupaten Sidoarjo telah berupaya untuk mengakomodir seluruh kebutuhan terkait kebutuhan pelayanan kepemiluan baik kepada masyarakat umum maupun stake holder pemilu khususnya. Peraturan KPU yang memberikan pengaturan secara detail meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan merupakan acuan yang memadai sebagai landasan pengambilan keputusan

F. Aspek Dukungan Infra Struktur dan Teknologi Informasi

Untuk KPU Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di wilayah perkotaan keberadaan infra struktur dan teknologi informasi cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Bangunan gedung yang digunakan KPU Kabupaten Sidoarjo cukup memadai meskipun sampai dengan saat ini gedung tersebut masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

G. Aspek Hubungan dengan Stake Holders

Hubungan stake holder KPU Kabupaten Sidoarjo terjalin cukup baik. Pemerintah Daerah memberikan dukungan yang memadai terkait sarana dan prasarana. Berbagai harapan dari stake holder KPU berusaha diakomodir dengan mengedepankan hubungan yang komunikatif dengan seluruh stakeholder termasuk unsur partai politik, LSM, Organisasi Kemasyarakatan maupun masyarakat pada umumnya.

1.3 PERMASALAHAN

A. Aspek Kelembagaan

- Secara eksternal hubungan kelembagaan KPU Kabupaten Sidoarjo dengan instansi terkait tentu khususnya sesama penyelenggara seringkali terkesan tumpang tindih dikarenakan beberapa tugas KPU Kabupaten Sidoarjo seakan-akan juga menjadi tugas Panwas Kabupaten hanya dengan

berpegang pada predikat pengawas. Situasi ini tentu saja menjadi situasi yang kurang nyaman bagi KPU Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan tugasnya.

- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah
- Beban kerja antar sub bagian belum seimbang sehingga masih terdapat sub bagian yang memiliki volume kerja cukup besar khususnya pada saat pelaksanaan tahapan pemilu.

B. Aspek Sumber Daya Manusia

- Sumber Daya Manusia yang mendukung kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo masih dipengaruhi perbedaan status antara DPK dengan PNS organik sehingga mempengaruhi hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- Sistem reward dan punishment terhadap pegawai belum memadai.
- Komisioner sebagai pejabat publik yang memiliki kedudukan setingkat dengan kedudukan Pegawai Negeri Sipil tertinggi pada Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo belum memahami hak dan kewajiban yang mengikat sebagai konsekuensi atas kedudukan tersebut.
- Tidak seluruh komisioner memahami posisinya sebagai unsur pengambil kebijakan sehingga proses operasionalisasi kegiatan terhambat karena pengambilan keputusan lambat.

C. Aspek Kepemimpinan

Adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan sekretariat perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi terhambat

D. Aspek Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik
- Perencanaan anggaran secara teori bersifat bottom up tetapi secara substansi masih bersifat topdown dimana usulan anggaran tidak sesuai dengan yang direalisasikan.

E. Aspek Business Process dan Kebijakan

- Belum tersedia SOP untuk pelayanan baik secara internal maupun eksternal
- Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan cenderung bersifat stagnan dan kurang inovatif sementara masyarakat sebagai konsumen membutuhkan tindakan-tindakan yang lebih inovatif dari KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

F. Aspek Dukungan Infra Struktur dan Teknologi Informasi

Untuk KPU Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di wilayah perkotaan dukungan infra struktur seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi pada kenyataannya keterbatasan sarana dan pembiayaan seringkali menjadi masalah tersendiri pada penyediaan dukungan infra struktur dan teknologi informasi.

G. Aspek Hubungan dengan Stake Holders

Stake holder KPU Kabupaten Sidoarjo yang ada antara lain Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya. Secara umum aspek hubungan dengan stake holder tidak bermasalah dan untuk meningkatkan kualitas hubungan perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif yang bersifat kontinyu, komunikatif dan antisipatif.

Selain permasalahan tersebut, seluruh jajaran KPU dari KPU RI sampai dengan KPU Kabupaten/Kota dihadapkan pada tantangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Tantangan tersebut antara lain:

- a. Perkembangan kondisi sosial masyarakat yang menjadi basis pemilih sangat dinamis, sehingga tuntutan pelayanan publik menjadi hal yang mutlak untuk dipenuhi.
- b. Media massa memiliki peran yang besar untuk membentuk opini publik
- c. Tuntutan transparansi informasi seperti menjadi pisau bermata dua karena dalam penyelenggaraan pemilu setiap informasi berpotensi untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk tujuan politis masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian potensi dan permasalahan tersebut, maka perumusan faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang dapat diringkas dalam tabel berikut ini

Tabel 1
Ringkasan Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (Strength) 1. Kedudukan KPU Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan independen. 2. Pola kepemimpinan yang terbuka 3. Reformasi birokrasi	Kelemahan (Weakness) 1. Overlapping program dan kegiatan dengan lembaga lain. 2. Beban kerja antar subbag kurang seimbang 3. Internalisasi budaya kerja masih lemah 4. Keterbatasan sarana dan prasarana 5. Pagu anggaran kurang memadai 6. Sistem penganggaran secara substansi masih bersifat top down
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (Opportunity) 1. Tugas pokok KPU merupakan bagian dari sasaran pokok pembangunan demokrasi 2. Hubungan baik dengan stake holder pemilu 3. Kesempatan untuk mengikuti diklat dan pendidikan formal 4. Kemajuan teknologi informasi	Ancaman (Threats) 1. Peraturan perundang-undangan tentang sistem pemilu mudah berubah karena tuntutan politik 2. Lunturnya nilai idealis sehingga pemilu menjadi ajang politik praktis 3. Keberadaan media massa yang bersifat provokatif

Berdasarkan identifikasi tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength – opportunity (S-O) yaitu strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi :
 - a. Mengefektifkan hubungan koordinasi dengan stake holder pemilu
 - b. Peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan diklat dan pendidikan formal
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi

2. Strategi Weakness – Opportunity (W – O) yaitu strategi untuk memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan :
 - a. Penyusunan SOP internal untuk menyamakan pemahaman terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
 - b. Optimalisasi sarana dan prasarana
 - c. Bekerjasama dengan stake holder untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat pembiayaan bersama untuk mencapai output yang diinginkan.

3. Strategi Strength – Threats (S – T) yaitu strategi untuk menghadapi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi :
 - a. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan publikasi baik secara kuantitas maupun kualitas dengan menggali inovasi kegiatan kegiatan serta meningkatkan jangkauan sasaran kegiatan sosialisasi dan publikasi.
 - b. Penyiapan SOP terkait transparansi dan akuntabilitas organisasi.
 - c. Menjalin hubungan yang harmonis dengan media massa.

4. Strategi Weaknes – Threats (W –T) yaitu strategi untuk menghindari ancaman agar dapat melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi :
 - a. Penataan lembaga dan perumusan fungsi tiap-tiap divisi termasuk kesekretariatan.
 - b. Internalisasi budaya kerja secara terus menerus dimulai dari pucuk pimpinan.
 - c. Penataan arsip dan dokumentasi kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan yang transparan dan akuntabel.

